



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)**

Tahun Sidang	: 2007-2008
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 29 Januari 2008
Waktu	: Pukul 10 ⁰⁰ – selesai
Ketua Rapat	Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra.Tri Udiartiningrum/Kabagset. Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membicarakan pelaksanaan program Askeskin dan masalah- masalah aktual yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas Depkes RI.
Anggota yang hadir	: 32 Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI 1 orang ljin, 1 orang sakit.

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya dibuka pukul 10.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat didahului dengan pengantar Ketua Komisi IX DPR RI.

KESIMPULAN / KEPUTUSAN

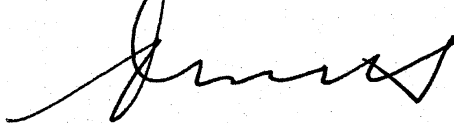
1. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI agar implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 segera dilaksanakan pengelolaannya melalui Badan Penyelenggara yang melaksanakan proses manajemen secara utuh yang meliputi manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, dan manajemen keuangan sehingga lebih dan mudah untuk diminta pertanggungjawaban.

2. Komisi IX DPR RI menyadari banyak kelemahan pelaksanaan Askeskin 2007 dan rencana Departemen Kesehatan RI menerbitkan mekanisme baru tentang pelaksanaan Askeskin 2008. Komisi IX DPR RI akan membentuk panja Askeskin. Panja ini akan memberi masukan kepada Pemerintah untuk menentukan sikap terhadap mekanisme baru tersebut. *Sambil menunggu kajian Panja, Departemen Kesehatan RI dapat melakukan pembayaran pelayanan kesehatan Januari, Februari, dan Maret 2008 kepada rumah sakit daerah.*
3. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Askeskin tahun 2007 sebesar Rp. 1,245 triliun yang belum terselesaikan. Sepanjang masa transisi ini, penggunaan *Surat Keterangan Tidak Mampu* masih tetap berlaku.
4. Komisi IX DPR RI sepakat akan mengadakan pertemuan dengan Departemen Kesehatan RI dan PT. Askes (Persero) untuk membahas program Askeskin mekanisme baru.

Rapat ditutup pukul 15.55 WIB

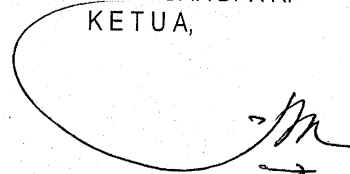
Jakarta, 29 Januari 2008

PEMERINTAH
MENTERI KESEHATAN RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp, JP (K)

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
KETUA,



dr. Ribka Tjiptaning